

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN PERSETUJUAN	ii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vii
INTISARI	x
ABSTRACT	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
E. Keaslian Penelitian	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	13
A. <i>Standard Operating Procedure</i>	13
1. Pengertian dan <i>Standard Operating Procedure</i>	13
2. Tujuan dan Manfaat <i>Standard Operating Procedure</i>	14
B. Bank Milik Pemerintah (BUMN)	16
1. Pengertian Bank BUMN	16
2. Peran dan Risiko Bank BUMN	17
3. Kebijakan Operasional Bank BUMN dan SOP Bank BUMN	19

4. <i>Prudential Banking</i>	23
C. Hukum Pidana Administrasi	26
D. Asas <i>Lex Specialis Derogat Legi Generali</i>	27
BAB III METODE PENELITIAN	30
A. Jenis dan Sifat Penelitian	30
1. Jenis Penelitian	30
2. Sifat Penelitian	31
B. Data Penelitian	31
1. Bahan Hukum Primer	31
2. Bahan Hukum Sekunder	33
3. Bahan Hukum Tersier	34
C. Cara dan Alat Pengumpulan Data	34
D. Analisis Data	35
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	36
A. Kesesuaian Penggunaan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan Asas <i>Lex Specialis Derogat Legi Generali</i> dalam Menyelesaikan Kasus Pelanggaran SOP Bank BUMN	36
B. Kesesuaian Penerapan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Perbuatan Melanggar SOP Bank BUMN dengan <i>Administrative Penal Law</i>	51
1. Sanksi Pidana di dalam Hukum Pidana Administratif (<i>Administrative Penal Law</i>)	51
2. Undang-Undang Perbankan sebagai Hukum Pidana Administrasi (<i>Administrative Penal Law</i>)	56

3. Posisi Pelanggaran SOP Bank di dalam Undang-Undang Perbankan	60
4. Penerapan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Pelanggaran SOP Bank BUMN	65
BAB V PENUTUP	81
A. Kesimpulan	81
B. Saran	82
DAFTAR PUSTAKA	84